

Peran Siauw Giok Tjhan dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI), 1954-1966

Stephanny Nira¹, Umasih, M². Hasmi Yanuardi³.

Universitas Negeri Jakarta

Email : stephannynira@gmail.com

Abstrack : *This research examines the role of Siauw Giok Tjhan in the Indonesian Citizenship Consultative Body (BAPERKI) which is a mass organization that aims to fight for equal rights and guarantee that all citizens of Chinese descent become Indonesian citizens (WNI). This study aims to find out how the citizenship status of Chinese in Indonesia in 1954 to 1966 and to find out how the role of BAPERKI in dealing with the problem of citizenship status at that time. The research method used in this study is the historical method, which consists of collecting sources (heuristics), source criticism (verification), interpretation and historiography. This study explains chronologically how the role of Siauw Giok Tjhan in BAPERKI and the solution for the people of Chinese descent in Indonesia at that time was unclear about citizenship status. As well as the facts that occurred at Siauw Giok Tjhan and BAPERKI after the events of the 30 September 1965 Movement which claimed many victims and huge losses for Siauw and BAPERKI.*

Keywords : Siauw Giok Tjhan, BAPERKI, WNI

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Siauw Giok Tjhan dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) yang merupakan organisasi massa yang bertujuan untuk memperjuangkan persamaan hak dan menjamin semua Warga Negara keturunan Tionghoa, menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status kewarganegaraan golongan Tionghoa di Indonesia pada tahun 1954 sampai 1966 dan untuk mengetahui bagaimana peran BAPERKI dalam menghadapi masalah status kewarganegaraan pada masa itu. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yakni yang terdiri dari pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menjelaskan secara kronologis bagaimana peran Siauw Giok Tjhan di BAPERKI dan jalan keluarnya bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia yang pada masa itu tidak jelas status kewarganegaraannya. Serta fakta-fakta yang terjadi pada Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang memakan banyak korban dan kerugian yang besar bagi Siauw maupun BAPERKI.

Kata kunci: Siauw Giok Tjhan, BAPERKI, WNI.

¹ Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNJ

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan suatu peristiwa yang berdampak besar bagi Indonesia. Sejak 2 Oktober 1965, atas perintah Jenderal Soeharto dengan dalih menumpas Gerakan 30 September, melakukan penumpasan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Penumpasan ini dilakukan dengan cara pengejaran, penangkapan, dan pembunuhan massal. Lebih dari satu juta orang yang dianggap menganut paham komunisme dibunuh secara kejam. Sekitar lima ratus ribu orang ditahan, puluhan ribu diantaranya ditahan tanpa proses hukum, sebelas ribu diantaranya dibuang ke Pulau Buru (Tjan, 2015: xi).

Disamping itu, jutaan orang yang dianggap berhaluan politik kiri mengalami persekusi yang dilakukan oleh negara selama belasan tahun. Dipecat dari pekerjaan, tidak memperoleh pekerjaan lain, diusir dari tempat kediaman, bahkan anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. *Didiskriminasi* dan diasingkan dari masyarakat dan hidup sebagai bagian yang membahayakan bagi masyarakat lainnya. Siauw Giok Tjhan yang turut menjadi korban kejahatan pada rezim tersebut memainkan peran penting dalam perpolitikan Indonesia.

Siauw seorang peranakan Tionghoa yang dikenal gigih dalam memperjuangkan perbaikan-perbaikan demi emansipasi bangsa Indonesia secara keseluruhan (Djin, 1999: 1). Siauw lahir di Surabaya, 23 Maret 1914. Sejak kecil Siauw sudah memiliki watak perlawanan atas penghinaan dan ketidakadilan yang terjadi atas dirinya dan etnisnya. Ketidakadilan yang dirasakan Siauw disebabkan diskriminasi yang muncul terhadap kelompok etnis minoritas Tionghoa (Tan, 2008: 265-266).

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dimulai sejak awal pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan awal menjadikan masyarakat Indonesia yang majemuk (Suryadinata, 1998: 8). Kebijakan khusus yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda terhadap orang Tionghoa antara lain adalah sistem opsir, sistem pemukiman, sistem pas jalan dan sistem status. Sistem status yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda membagi Indonesia dalam tiga lapisan atau kelompok, yaitu Golongan Eropa (Belanda) merupakan golongan paling atas, Golongan Timur Asing (Tionghoa, Jepang, Arab, India) merupakan golongan tengah dan golongan yang paling bawah dan mayoritas jumlahnya adalah golongan *inlanders* atau pribumi. Ketiga lapisan tersebut hidup terpisah satu sama lain dalam dunianya masing-masing dan berbeda pula dalam kedudukan hukum maupun fungsi serta tingkat ekonominya (Grief, 1991: xii). Hal tersebut yang menyebabkan orang Tionghoa semakin terisolasi dari penduduk pribumi.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1946 yang bertujuan untuk mempermudah penduduk keturunan asing menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Tujuan pemerintah pada saat itu untuk memperoleh dukungan ekonomi terutama dari masyarakat Tionghoa yang berperan penting dalam perekonomian. Dalam perkembangannya status kewarganegaraan orang Tionghoa yang telah menjadi WNI terancam dengan dikeluarnya Rancangan Undang-undang (RUU) kewarganegaraan tahun 1954. Selain itu Undang-undang Dwi-Kewarganegaraan yang berusaha menyelesaikan pelaksanaan berjalan sangat lambat.

Rancangan undang-undang tersebut menciptakan kekhawatiran bagi masyarakat Tionghoa terutama peranakan yang sebagian besar sudah berstatus WNI. Sebagai jalan keluarnya, pada tahun 1954 masyarakat Tionghoa membentuk Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI)⁴. Tujuan dibentuknya

⁴ BAPERKI adalah sebuah organisasi massa yang anggotanya terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mayoritas Peranakan atau Keturunan Tionghoa. H. Junus Jahya, *Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya*, (Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm.207

BAPERKI untuk memperjuangkan hak kewarganegaraan orang Tionghoa di Indonesia. Siauw Giok Tjhan terpilih sebagai ketua BAPERKI yang juga memiliki peran yang sangat besar. Siauw mencanangkan konsep *integrasi* yang menghendaki warga negara keturunan Tionghoa menyatu kedalam tubuh bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan kebudayaannya dan diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Sementara status kewarganegaraan belum jelas, pemerintah Indonesia menjalankan beberapa kebijakan ekonomi yang berdampak besar bagi orang Tionghoa, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.10 (PP 10) yang dikeluarkan pada November 1959. Peraturan Presiden No.10 melarang Warga Negara Asing (WNA) untuk bergerak di bidang perdagangan di wilayah pedalaman atau pedesaan (Setiono, 2008: 811). Peraturan tersebut dipandang sangat diskriminatif dan membuat banyak orang Tionghoa diusir dari wilayah pedesaan dan pulang ke Tiongkok.

Pada tahun 1960 mulai muncul gerakan *asimilasi* di Indonesia yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi tersebut. Pada tahun 1963 kelompok pendukung asimilasi tersebut membuat Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang didukung langsung Angkatan Darat dan dibentuk dengan tujuan menandingi dan membatasi pengaruhnya di dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia. Sebagian besar pemimpin LPKB bersimpati pada politik yang berhaluan kanan dan anti komunisme. Sedangkan BAPERKI yang dipimpin oleh Siauw berada dalam kubu politik kiri yang menyangkut cara penyelesaian masalah minoritas Tionghoa di Indonesia.

Siauw Giok Tjhan menolak konsep asimilasi tersebut dan menganjurkan konsep integrasi, atau yang sekarang lebih dikenal dengan pluralisme dan dijadikan dasar perjuangan bagi BAPERKI. Gagasan Siauw mengenai Integrasi yaitu Integrasi yang wajar, mengalir apa adanya, tanpa rekayasa dan tanpa ada paksaan. Menurutnya, kecintaan seseorang terhadap Indonesia, tidak bisa diukur dari nama, bahasa dan kebudayaan yang dipertahankannya, melainkan dari tindak tanduk dan kesungguhannya dalam berbakti untuk Indonesia (Djin, 2000: 23). Siauw sangat menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menurutnya berarti :

berbeda-beda, tetapi tetap satu, tak pernah ada peraturan yang mendua. Mendua baginya berarti diskriminasi.

Perjuangan Siauw dalam melawan diskriminasi tersebut dapat dilihat melalui perannya dalam pemerintahan Indonesia. Siauw duduk dalam berbagai badan legislatif di Indonesia. Ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1946-1947, anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia Sementara (DPR-RIS) tahun 1949, Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) tahun 1950-1959, Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) tahun 1960-1965, anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tahun 1959-1965, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1960-1965, dan pada tahun 1954-1966 Siauw menjadi ketua umum BAPERKI. Salah satu peninggalan BAPERKI adalah Universitas Respublica (URECA) yang pada saat ini berubah menjadi Universitas Trisakti.

Pada 4 November 1965 Siauw dan beberapa tokoh BAPERKI lainnya ditangkap. Salah satu peninggalan BAPERKI, Universitas Republica dibakar oleh massa yang didukung oleh militer pada tanggal 15 Oktober 1965. Pada Maret 1966, BAPERKI resmi dibubarkan, dan saat itu juga Siauw dipecat dengan homat dari keanggotaan DPR, MPRS, dan DPA. Siauw menjadi tahanan politik selama 12 tahun tanpa proses hukum yang jelas. Selama dipenjara ia banyak bertemu dengan orang-orang hebat, ia pun banyak menulis dan menganalisis tentang kejadian 30 September dengan sangat teliti. Siauw diijinkan pulang kerumah dengan status tahanan rumah pada 1975 hingga 1978.

Selepasnya dari status tahanan pada 1978, kondisi Siauw mulai melemah dikarenakan tekanan yang ia dapatkan di penjara. Siauw dan istrinya terbang ke Belanda untuk berobat. Tidak sampai disitu perjuangan Siauw, setibanya di Belanda, ia aktif dalam berbagai kegiatan. Kehadirannya di Belanda mengubah pola kerja para pelarian politik Indonesia yang menetap disana. Ia juga memimpin usaha pengumpulan dana untuk para eks-tahanan politik dan keluarganya. Selain itu, Siauw juga sering memberi ceramah tentang keadaan politik Indonesia dan jalan keluarnya

diberbagai kota di Eropa. Siauw meninggal dunia pada 1981 sebelum ia sempat memberikan ceramah mengenai Indonesia dihadapan para ahli Belanda di Universitas Leiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Siauw Giok Tjhan dalam organisasi BAPERKI, bagaimana peran Siauw Giok Tjhan dalam memperjuangkan hak kewarganegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemikiran Siauw Giok Tjhan tentang Integrasi, terhadap kebijakan Asimilasi di Indonesia yang kurang mendapat sorotan bagi publik pada era saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan analisis sejarah melalui studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Data dan informasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti arsip, majalah, koran, dan buku-buku terkait yang relevan dengan pembahasan mengenai Peran Siauw Giok Tjhan dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI), 1954-1966. Data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan dan disusun untuk dianalisis. Dengan menggunakan pendekatan dan analisis sejarah serta kajian pustaka, diharapkan artikel ini mampu menjelaskan mengenai Peran Siauw Giok Tjhan dalam BAPERKI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Siauw Giok Tjhan

Siauw Giok Tjhan lahir di Kapasan, Surabaya, 23 Maret 1914. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Siauw Gwan Swie dan Kwan Tjian Nio. Siauw Giok Tjhan merupakan hasil dari perkawinan campuran antara totok dan peranakan. Ayahnya lahir di Surabaya tahun 1880 adalah seorang peranakan dari Hokkian. Ia tidak bisa berbahasa Hokkian atau Mandarin, sedangkan ibunya berasal dari keluarga totok yang berbahasa Hakka. Ibunya, Kwan Tjian Nio fasih dalam berbicara bahasa Mandarin.

Pada tahun 1918 Siauw Giok Tjhan berusia 4 tahun, ia bersekolah di THHK (*Tiong Hoa Hwee Koan*). Pada tahun 1920 Siauw belajar Bahasa Belanda di *Buys Instituut* selama beberapa bulan sebelum masuk ke ELS (*Europeesche Lagere School*) yang merupakan sekolah Belanda. Setelah lulus dari ELS tahun 1927, Siauw Giok Tjhan melanjutkan sekolahnya ke *Hogere Burger School*). Pendidikannya di HBS membuat Siauw Giok Tjhan mahir dalam bahasa asing, Inggris, Belanda, Perancis dan Jerman. Pada tahun 1932, saat Siauw Giok Tjhan berusia 18 tahun dan ia duduk dikelas terakhir HBS, ayahnya mengalami kebangkrutan dan pada waktu yang bersamaan, ibunya meninggal dunia karena pendarahan dalam tubuh. Karena keadaan yang sulit tersebut, ayah Siauw Giok Tjhan tidak bisa menahan masalah tersebut dan menderita penyakit tekanan darah tinggi dan gula. Setelah 6 bulan kematian ibunya, ayahnya pun meninggal dunia. Pada saat itu juga Siauw Giok Tjhan dan adiknya, Siauw Giok Bie menjadi yatim piatu.

Saat kondisi Siauw Giok Tjhan sedang terpuruk atas kepergian keluarganya, ia bertemu dengan Liem Koen Hian yang merupakan pendiri PTI (Partai Tionghoa Indonesia) dan bertugas sebagai presiden pertama PTI tahun 1932 (Suryadinata, 2005: 88). Siauw bergabung dengan PTI dan menjadi pendiri termuda yang berusia 18 tahun. Karena ketertarikan Siauw dengan Liem sangat besar, Siauw memutuskan untuk memulai kariernya sebagai wartawan. Dengan bantuan Liem, pada tahun 1933 Siauw dipekerjakan untuk membantu The Boen Liang, yang merupakan salah seorang pemimpin PTI di harian Sin Tit Po Surabaya.

Tidak lama setelah Siauw masuk ke harian Sin Tit Po. Siauw ditarik oleh Kwee Hing Tjiat untuk masuk menjadi staf di harian Mata Hari Semarang pada tahun 1934. Setelah Kwee Hing Tjiat meninggal dunia. Pimpinan harian Mata Hari diambil alih oleh Siauw. Di bawah pimpinan Siauw, Mata Hari menjadi lebih radikal dalam mendukung gerakan revolusi Tiongkok dan menjadi lebih anti Jepang. Setelah Indonesia merdeka, pada Desember 1945, Siauw memilih masuk ke dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan tujuan ia bisa mempengaruhi program-program

partai dan laskar-laskar pemuda yang berada di dalam naungan Partai Sosialis, sehingga sikap mereka terhadap golongan Tionghoa berubah.

Siauw juga diangkat ke dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tahun 1946, dan kemudian pada tahun 1947-1948 menjadi Menteri Urusan Minoritas dalam kabinet Amir Syarifuddin. Siauw Giok Tjhan yang pada saat itu belum lama pindah ke Jakarta, pada awal 1950, ia memimpin dan menerbitkan majalah mingguan *Sunday Courier* dan pada Januari 1951 ia menerbitkan majalah mingguan Suara Rakyat yang pada bulan Juli diubah namanya menjadi harian dengan nama Harian Rakyat. Akhirnya, pada 31 Oktober 1953, Harian Rakyat diambil alih oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Njoto menjadi pimpinan dan penanggung jawabnya.

Karier Siauw Giok Tjhan sebagai anggota parlemen dalam periode demokrasi perlementer dimulai pada Januari 1950, ia diangkat menjadi anggota DPR-RIS, sebagai wakil negara bagian RI, di Jakarta. Di tahun yang sama juga, Siauw masuk ke dalam fraksi Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) (Djin, 2000: 63-64). Keaktifan Siauw dalam dunia Parlemen dan Pers membuatnya terpilih sebagai Ketua Umum Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI). Lahirnya BAPERKI merupakan lembaran baru dalam sejarah perjuangan Siauw Giok Tjhan. BAPERKI didirikan pada 13 Maret 1954 dan merupakan kesempatan bagi Siauw untuk menyebarkan gagasan dan pandangan politiknya.

Presiden Soekarno pada 22 Juli 1959 membentuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang beranggotakan 46 orang. Siauw diangkat oleh Soekarno sebagai salah seorang anggota. Pada awal tahun 1960, Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong (DPR-GR). DPR-GR yang beranggotakan 283 orang diresmikan pada Juni 1960 dan Siauw duduk dalam DPR-GR dan berada di dalam Golongan Karya. Di tahun yang sama Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan mengangkat Siauw menjadi anggotanya.

Siauw Giok Tjhan dan Pemikirannya

Sepanjang tahun 1950-an terjadi perdebatan di kalangan masyarakat Tionghoa mengenai ketidakjelasan status kewarganegaraan mereka. Perdebatan tersebut tidak hanya terjadi pada bidang politik, tetapi merambat ke bidang-bidang lain. Perdebatan tersebut selalu memunculkan diskriminasi terhadap golongan Tionghoa di Indonesia, yaitu masalah yang berkaitan dengan dominasi ekonomi yang dimiliki golongan Tionghoa. Menjelang akhir tahun 1950-an, perdebatan semakin memuncak karena rentetan peristiwa tersebut memunculkan rasa khawatir, kecewa dan tidak aman pada golongan Tionghoa di Indonesia.

Ketika sentiment anti-Tionghoa memuncak, muncul perdebatan- perdebatan tentang jalan keluar yang harus ditempuh oleh masyarakat Tionghoa. Perdebatan tersebut memunculkan ide agar masyarakat Tionghoa *ber-asimilasi*⁵ dengan golongan pribumi. Tahun 1960 sekelompok golongan peranakan Tionghoa mencanangkan ide *asimilasi* sebagai solusi dari masalah minoritas Tionghoa di Indonesia. Golongan tersebut merupakan orang-orang yang dahulunya ikut mendirikan BAPERKI, tetapi pada tahun 1955 mereka meninggalkan BAPERKI dengan alasan tidak sejalan atau tidak sepemikiran lagi. Kelompok pendukung *asimilasi* pada 24 Maret 1960 yang terdiri dari sepuluh orang, mengeluarkan pernyataan yang dinamakan “Pernyataan Asimilasi.” Dalam pernyataan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa asimilasi adalah satu-satunya jalan keluar yang bisa ditempuh oleh golongan peranakan Tionghoa Indonesia.

Artikel-artikel yang diterbitkan oleh *Star Weekly* menimbulkan berbagai reaksi dari pembaca, baik golongan totok maupun peranakan. Golongan totok sebagian besar mendorong adanya kebijakan asimilasi. Golongan peranakan terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama mendorong adanya kebijakan asimilasi di Indonesia. Kubu kedua dengan tegas menolak kebijakan asimilasi di Indonesia. Kubu kedua tersebut

⁵ Asimilasi merupakan proses penyatuan secara total. Sunario, “Pentingnya Politik “Assimilasi” dalam Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Negara Indonesia”, dalam *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa: Sambutan-sambutan/Prasarana-prasarana pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1963 di Djakarta*, Departemen Penerangan RI (ed.), Jakarta.

merupakan orang-orang yang mendukung kebijakan dan pemikiran *integrasi* dari BAPERKI. Tahun 1963, kelompok pendukung *asimilasi* tersebut membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) yang secara resmi didukung langsung oleh pimpinan Angkatan Darat dan beberapa tokoh politik lainnya seperti Roeslan Abdulgani.

Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa memiliki visi yang bertolak belakang dengan BAPERKI, salah satu visi LPKB adalah asimilasi disegala bidang kehidupan secara serentak dengan menitikberatkan pada asimilasi total. Asimilasi dilakukan dalam lima bidang kehidupan yaitu, asimilasi dalam bidang politik, asimilasi kultural (budaya), asimilasi ekonomi, asimilasi sosial, asimilasi kekeluargaan (pernikahan) (Soyomukti, 2012: 153). Siauw Giok Tjhan yang merupakan ketua BAPERKI menolak kebijakan *asimilasi* dan menganjurkan *integrasi*. Konsep integrasi ini memiliki arti bahwa Indonesia terdiri dari banyak ras dan ras Tionghoa termasuk dalam suku bangsa yang ada di Indonesia. Setiap suku yang ada di Indonesia tetap mempertahankan identitas kesukuan mereka seperti nama, bahasa dan kebudayaannya, tetapi tetap bekerja sama dengan suku lainnya dalam membangun Indonesia. Berdasarkan konsep ini, Siauw mengatakan bahwa suku Tionghoa adalah bagian dari masyarakat yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*.

Siauw Giok Tjhan selalu yakin bahwa memiliki nama Indonesia atau agama tertentu, bahkan memiliki bentuk dari ciri “asli” bukanlah ukuran yang bisa digunakan untuk menentukan setia atau tidaknya seseorang terhadap Indonesia. yang terpenting, menurut Siauw adalah suasana dan kondisi yang mendorong orang-orang yang memiliki nama-nama Tionghoa dan yang masih menjalankan adat-istiadat serta kebudayaan Tionghoanya untuk berbakti kepada Indonesia. Menurut Siauw konsep tersebut dapat tercapai jika setiap suku, termasuk suku Tionghoa mengintegrasikan diri mereka di dalam masyarakat dalam setiap kegiatan politik dan sosial sehingga aspirasi rakyat Indonesia menjadi aspirasi suku-suku tersebut.

Menurut Siauw, dengan Integrasi, golongan Tionghoa tetap dapat mempertahankan nama, bahasa dan kebudayaannya dan tetap dapat bekerja dengan

suku-suku lainnya untuk membangun bangsa Indonesia. Konsep Integrasinya sangat berkaitan dengan pembangunan bangsa dan kesukuan. Menurut Siauw Giok Than, asimilasi telah gagal di beberapa negara lainnya, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat yang mengenal konsep “*melting pot*” atau “peleburan total”, ternyata tidak berhasil menyelesaikan masalah “*negro*”. Siauw menentang asimilasi karena menurutnya, asimilasi mengandung suatu paksaan yang bisa menuju ke proses penghilangan identitas biologis dari suatu suku bangsa. Melanggar hak azazi manusia, bahkan bisa dikategorikan sebagai usaha *genocide* yang terkutuk. Di samping itu, urusan nama, perkawinan bahkan agama adalah urusan pribadi setiap orang. Kebijakan untuk mengganti nama, agama dan calon pasangan merupakan suatu pelanggaran hak azazi manusia.

Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI

Pada tahun 1953, Partai Demokrasi Tionghoa Indonesia (PDTI) yang merupakan organisasi Tionghoa Indonesia yang bergerak dalam kegiatan politik berada dalam keadaan sekarat dan para pemimpinnya menyatakan bahwa PDTI sudah tidak mampu lagi untuk memperjuangkan kepentingan golongan Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pemikiran para tokoh PDTI untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat guna membahas masalah RUU Kewarganegaraan Indonesia. Tokoh PDTI kemudian mengundang para tokoh peranakan Tionghoa untuk menghadiri pertemuan tersebut. Siauw Giok Tjhan yang pada saat itu menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Februari 1954 dan menghasilkan sebuah organisasi Badan Permusyawaratan Warga Negara Turunan Tionghoa (BAPERWATT). Kriteria pemimpin organisasi ini adalah seorang yang mempunyai kaliber nasional, yang memiliki pengaruh di DPR sehingga posisi golongan Tionghoa bisa dilindungi dari segi hukum dan undang-undang. Menurut Oei semua yang hadir pada pertemuan tersebut setuju bahwa calon ketua yang paling cocok untuk BAPERWATT adalah Siauw Giok Tjhan. Keberhasilan Siauw di dalam parlemen

dalam membatalkan atau mengubah berbagai macam undang-undang yang merugikan posisi golongan Tionghoa memperkuat keyakinan mereka memilih Siauw.

Siauw menyatakan bahwa ia tidak bersedia menjadi ketua BAPERWATT, tetapi ia tidak keberatan untuk menghadiri pertemuan pembentukan BAPERWATT yang diadakan pada 13 Maret 1954, bertempat di gedung Sin Ming Hui, Jalan Gajah Mada 188, Jakarta. Siauw Giok Tjhan diberikan kesempatan untuk berpendapat, ia menyampaikan keberatannya dengan nama organisasi BAPERWATT. Menurutnya, BAPERWATT dengan sendirinya membatasi keanggotaan pada golongan Tionghoa. Baginya ini adalah tindakan yang bersifat eksklusif, jadi mengandung rasialisme. Bila organisasi ini mempertahankan nama BAPERWATT, dukungan tokoh-tokoh nasional yang sangat diharapkan dalam mencapai tujuan organisasi yang akan dibentuk ini, tidak kunjung datang, karena ruang lingkupnya sempit dan rasialistis.

Siauw mengusulkan untuk mengubah formulasi organisasi yang akan dibentuk secara struktural. Pertama, tujuan dari organisasi ini harus berhubungan dengan masalah kewarganegaraan karena baginya masalah membangun bangsa Indonesia (*nation building*) tidak bisa dipisahkan dari pengertian tentang arti politik kewarganegaraan, dan pemberantasan rasialisme tidak bisa dipisahkan dari usaha mencapai persamaan di antara semua warga negara. Oleh karena itu, Siauw mengajukan perubahan nama BAPERWATT menjadi BAPERKI. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia resmi dibentuk pada 13 Maret 1954.

Pada tahun 1955 BAPERKI ikut serta dalam Pemilihan Umum. Pada masa kampanyenya, BAPERKI berhasil menciptakan *antusiasme* dalam kalangan Tionghoa untuk mendukungnya. Dalam Pemilihan Umum tersebut BAPERKI berhasil mengumpulkan 70% dari suara golongan Tionghoa di Jawa, BAPERKI juga berhasil meraih jauh lebih banyak suara orang-orang Tionghoa bila dibandingkan dengan semua organisasi yang berpartisipasi dalam pemilu. Suara sejumlah 178.887 yang berhasil diperoleh BAPERKI memberikan hak untuk mendapatkan satu kursi di Parlemen. Sebagai urutan pertama calon di Parlemen, maka Siauw Giok Tjhan yang mengisi kursi tersebut. Karena BAPERKI tidak memiliki vote-pooling dengan

organisasi lainnya, surplus suara yang melebihi 43.000 tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan tambahan kursi. Selain Siau, ada juga tokoh Tionghoa yang mendapat kursi, Tjoo Tik Tjoen yang berusia 34 tahun, ia menjabat sebagai sekretaris PKI di Surabaya.

Kedekatan Siau dengan Soekarno membuat hubungan yang baik antara BAPERKI dan PKI. Terjadi peristiwa besar pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa tersebut dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan terbunuhnya 6 jenderal yang diduga dilakukan oleh PKI. Peristiwa tersebut memunculkan banyak konspirasi. Sejak saat itu Soeharto memobilisasikan pasukannya ke seluruh Indonesia untuk menangkap anggota PKI, simpatisan PKI, dan semua yang terlibat dengan PKI. Gedung-gedung PKI dan berbagai organisasi kiri lainnya diserang, dibakar dan dirusak oleh massa. Pimpinan Angkatan Darat juga mendorong anggotanya untuk membersihkan masyarakat dari elemen-elemen komunisme. Dorongan tersebut berubah menjadi gerakan yang dengan sistematis membunuh ratusan ribu orang yang dituduh PKI dan simpatisannya. PKI beserta ormas-ormasnya dibantai, ditangkap dan disiksa tanpa mampu memberikan perlawanan.

Organisasi anti-komunis menuntut pembubaran PKI beserta ormasnya, mereka juga menuntut pembubaran BAPERKI yang dianggap sebagai kaki tangan PKI. Disamping itu, BAPERKI juga dianggap sebagai organisasi pro RRT yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Universitas Respublica (URECA) yang merupakan Universitas milik diserang oleh ribuan massa pada tanggal 15 Oktober 1965 dan resmi dibubarkan. Gedung-gedungnya dibakar dan dirusak. Gerakan anti BAPERKI mulai bermunculan. Banyak anggota BAPERKI di luar Jakarta dikejar dan ditangkap.

Siau dipecat dengan hormat dari jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong (DPR–GR), Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada Januari 1966. Soekarno melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) resmi menyerahkan kekuasaannya pada

Soeharto. Tanggal 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan instruksi yang meresmikan pembubaran PKI berikut seluruh ormasnya, termasuk BAPERKI. Saat itu BAPERKI resmi dibubarkan. Para pemimpin organisasinya telah ditahan. Universitas Respublica dibangun kembali dengan nama Trisakti dan diubah komposisinya. Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) juga aktif mengganti acara pendidikan BAPERKI, semua sekolah-sekolah BAPERKI diambil alih oleh Departemen Pendidikan. Dosen-dosen serta guru-guru yang berhaluan politik kiri dipecat. Siauw Giok Tjhan sendiri harus meringkuk dalam tahanan selama 12 tahun tanpa ada proses hukum yang jelas.

KESIMPULAN

Peran Siauw Giok Tjhan dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) dan keaktifannya dalam memperjuangkan hak kewarganegaraan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peran yang ia lakukan di dalam BAPERKI maupun pemerintahan Indonesia. Sebelum terbentuknya BAPERKI, perlakuan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa Indonesia merupakan tekanan yang sangat berat. Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan etnis minoritas yang terus mencari dan membutuhkan pengakuan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Sepanjang tahun 1950-an kembali terjadi perdebatan dikalangan masyarakat Tionghoa mengenai ketidakjelasan status kewarganegaraan mereka. Perdebatan tersebut tidak hanya terjadi pada bidang politik, tetapi merambat ke bidang-bidang lain. Perdebatan tersebut selalu memunculkan diskriminasi terhadap golongan Tionghoa di Indonesia. Perdebatan tersebut dikenal dengan paham Integrasi *versus* Asimilasi. Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) memiliki visi yang bertolak belakang dengan BAPERKI, salah satu visi LPKB adalah asimilasi di segala bidang kehidupan secara serentak. Perdebatan antara konsep asimilasi dan integrasi mencapai puncak pada tahun 1963.

Pergantian nama di kalangan etnis Tionghoa bisa dikatakan tidak sepenuhnya dapat mempercepat proses asimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Realitanya orang-orang Tionghoa tetap menjadi korban rasialisme pada kerusuhan Mei 1998 meskipun sebagian besar etnis Tionghoa sudah memutuskan untuk mengganti nama mereka menjadi nama yang lazim di Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa dengan mengganti nama tidak dapat mengubah pandangan negatif orang terhadap etnis Tionghoa.

DAFTAR PUSTAKA

Greif, Stuart William. (1991). *WNI: Problematik Orang Indonesia asal Cina (Terj. A. Dahana)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Jahja, H. Junus. (2002). *Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Negara Indonesia. *Assimilasi dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa: Sambutan-sambutan/Prasarana-prasarana pada Musjawarah Assimilasi pada tanggal 10 s/d 12 Maret 1093 di Djakarta*. Jakarta : Departemen Penerangan RI.

Setiono, G. Benny.(2008). *Tionghoa dalam pusaran politik*. Jakarta: TransMedia.

Siauw Giok Tjhan. (2005). *G30S dan Kejahatan Negara*. Bandung: Ultimus.

Siauw Tiong Djin. (1999). *Siauw Giok Tjhan: Riwayat perjuangan seorang patriot membangun nasional Indonesia dan masyarakat Bhineka Tunggal Ika*. Jakarta: Hasra Mitra.

_____. (2000). *Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI dalam Sejarah Indonesia dengan Pidato Bung Karno pada Kongres-8 BAPERKI (Maret-1963) sebagai makna "Nation Building"*. Jakarta : Hasta Mitra.

Soyomukti, Nurani. (2012). *Soekarno dan Cina*. Jogjakarta: Garasi.

Suryadinata, Leo. (2005). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: LP3ES.

_____. (1998). Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia. *Symposium Etnis Cina Sebagai Minoritas di Indonesia*, Depok: Oktober 1998

Tan, G. Melly. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.